KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH KEPULAUAN RIAU

BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN



**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN**

**MUSRENBANG POLDA KEPRI TAHUN 2020 DI RUPATAMA POLDA KEPRI**

 **TANGGAL 9 JULI 2020**

1. **PENDAHULUAN**
2. **Dasar**
	1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
	2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
	3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia (SISRENSTRA POLRI);
	4. Surat Perintah Karorena Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor: Sprin/901/VII/REN.1.3./2020 tanggal 3 Juli 2020 tentang panitia pelaksanaan Musrenbang Polda Kepulauan Riau Tahun 2020;
	5. Surat Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor : B/1786/VII/REN.2.3./2020/Rorena tanggal 6 Juli 2020 tentang pemberitahuan pelaksanaan Musrenbang Polda Kepri Tahun 2020.
3. **Maksud Dan Tujuan**
4. Maksud

Maksud dari laporan ini disusun sebagai gambaran kepada pimpinan tentang kegiatan Musrenbang Polda Kepri Tahun 2020 yang dilaksanakan di Rupatama Polda Kepri tanggal 9 Juli 2020.

1. Tujuan

Tujuan dari penyusunan laporan ini untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran kegiatan Musrenbang Polda Kepri Tahun 2020.

1. **PELAKSANAAN**
2. Waktu dan tempat

Musrenbang Polda Kepulauan Riau Tahun 2020 dilaksanakan di Rupatama Polda Kepri pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020.

1. Peserta

Peserta Musrenbang Polda Kepulauan Riau Tahun 2020 meliputi :

1. Pembukaan :
2. Kapolda Kepri;
3. Wakapolda Kepri;
4. Irwasda Polda Kepri;
5. Karorena Polda Kepri;
6. Karoops Polda Kepri;
7. Karolog Polda Kepri;
8. Karo SDM Polda Kepri;
9. Dirreskrimum Polda Kepri;
10. Kabiddokkes Polda Kepri;
11. Para Kabag di lingkungan Rorena Polda Kepri;
12. Para Kasubbagrenmin Satker Polda Kepri;
13. Kapolres/Ta + Wakapolres/Ta + Kabagren dan staf jajaran Polda Kepri (melalui sarana Vicon).
14. Pelaksanaan :
15. Para Kabag di lingkungan Rorena Polda Kepri;
16. Para Kasubbagrenmin Satker Polda Kepri;
17. Wakapolres/Ta + Kabagren dan staf jajaran Polda Kepri (melalui sarana Vicon);
18. Kasubbagrenmin SPN Polda Kepri dan staf (melalui sarana Vicon).
19. Penyaji Materi
20. Dirintelkam Polda Kepri;
21. Karoops Polda Kepri;
22. Karorena Polda Kepri;
23. Kabagdalprogar Rorena Polda Kepri;
24. Kabag RBP Rorena Polda Kepri;
25. Kabagstrajemen Rorena Polda Kepri.
26. Pelaksanaan Rapat

Penyampaian materi Musrenbang Polda Kepulauan Riau Tahun 2020 meliputi :

1. paparan oleh Dirintelkam Polda Kepri tentang perkiraan keadaan intelijen daerah hukum Polda Kepri Tahun 2021 dan dampak pandemi Covid-19 terhadap situasi Kamtibmas sebagai berikut;
2. Secara umum situasi kamtibmas Polda Kepri masih dalam keadaan aman kondusif, aktifitas masyarakat masih berjalan walaupun suasana pandemi covid-19, penyebaran covid-19 di Kepri masih terus terjadi namun tidak signifikan;
3. Isi penolakan RUU HIP, khilafah dan komunis akan terus digulirkan oleh kelompok tertentu yang tidak sejalan dengan pemerintah serta dimanfaatkan guna mengiriing opini negatif publik untuk mendiskreditkan pemerintah;
4. Diprediksi pasca penetapan paslon dalam pilkada akan memanas berpotensi terjadi bentrok/gesekan antar pendukung serta aksi anarkis akan terus berlangsung sampai dengan Tahun 2021 ;
5. Menyongsong masa *new normal* ke depan aktifitas masyarakat yang bersifat pengumpulan masa akan meningkat ditambah lagi dibukanya sektor pariwisata, peragangan dll;
6. Sejalan dengan dimulainya *new normal* maka gangguan kamtibmas khususnya kejahatan konvensional, transnasional, *ciber crime* diprediksi akan terjadi peningkatan.
7. Paparan oleh Karoops Polda Kepri tentang kesiapan Polda Kepri dalam pengamanan Pilkada serentak Tahun 2020 di daerah hukum Polda Kepri sebagai berikut;
8. Operasi Mantap Paraja 2020 pemilihan gubernur dan bupati di prov Kepri dimulai 4 September 2020 s.d Februari 2021 (pelantikan kepala daerah terpilih);
9. Masa kampanye sesuai dengan petunjuk terakhir dari KPU dilaksanakan secara virtual di kantor partai masing masing untuk meminimalisir penyebaran covid-19 ;
10. Akan dilakukan efesiensi pelibatan personel dalam rangka pengamanan Operasi Mantap Praja 2020 sehingga anggaran bisa digunakan untuk kegiatan lain;
11. Berdasarkan surat KPU prov. Kepri no : 197/pl/02.1.-sd/21/prov/2020 jumlah TPS sebanyak 4.093;
12. Untuk anggaran Operasi Mantap Praja Tahun 2020 seluruh wilayah yang melaksanakan pilkada sudah didukung oleh anggaran hibah dari pemda dengan jumlah total Rp. 37.493.016.000 sudah tertuang dalam NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah);
13. Agar masing-masing satwil yang melaksanakan pengamanan pilkada Tahun 2020 menyiapkan dengan matang rencana operasi, rencana pengamanan, gunakan anggaran sesuai dengan ketentuan dan tetap memperhatikan protokol kesehatan penularan covid-19.
14. Paparan oleh Karorena Polda Kepri tentang perencanaan dan penganggaran Polda Kepri sebagai berikut;
15. Masing-masing satker dalam menyusun produk-produk perencanan agar mempedomani mekanisme yang sudah tertuang dalam Perkap Nomor 17 Tahun 2012 serta selaras dengan produk perencanaan di atasnya sehingga apa yang menjadi kebijakan pimpinan Polri bisa dilaksanakan oleh tingkat satker;
16. Saat ini program anggaran sudah dilakukan redisign, sebelumnya program yang ada berjumlah 13 program untuk Tahun 2021 sudah menggunakan 5 program;
17. Penyusunan perencanaan Polri menganut sistem *botton up* dengan memperhatikan azaz keterpaduan dan kesatuan, azaz manfaat dan prioritas, azaz keseimbangan dan keserasian, azaz kekenalan dan pandangan jauh kedepan, azaz pembagian wewenang dan tanggung jawab;
18. Jumlah Polsek di wilkum Polda Kepri sebanyak 44 Polsek yang tersebar di 7 Polres/Ta tidak sebanding dengan jumlah kecamatan yang ada, sehingga masih banyak kecamatan yang belum memiliki Polsek, para kabagren silahkan mengajukan usulan pembentukan polsubsektor sebagai cikal bakal Polsek dengan mempersiapkan lahan berkoordinasi dengan Pemda setempat;
19. Paparan oleh Kabagdalprogar Rorena Polda Kepri tentang Mekanisme Revisi, pengendalian dan Realisasi Anggaran sebagai berikut;
20. PMK 39 tentang mekanisme revisi anggaran terdiri atas revisi anggaran dalam hal pagu berubah, revisi anggaran dalam hal pagu tetap dan revisi admnistrasi;
21. Kewenangan persetujuan usulan revisi anggaran antara lain : revisi anggaran pada DJA, revisi anggaran pada DJPB, revisi anggaran KPA dan revisi pada persetuan DPR;
22. Dalam hal belanja terkait kegiatan pandemi covid-19 harus memiliki akun tersendiri (akun covid-19) ;
23. Batas akhir penerimaan usulan dan penyampaian pengesehan revisi anggaran, 30 Oktober 2020 (untuk DJA), 30 Nop 2020 (untuk DJPB), 18 Desember 2020 (untuk pagu minus belpeg, hibah, buka blokir, APBN perubahan), 28 Des 2020 (untuk revisi gar memerlukan persetujuan kemenkeu), 28 Des 2020 (pada kanwil DJPB revisi POK).
24. Paparan oleh Kabag RBP Rorena Polda Kepri tentang Reformasi Birokrasi Polri sebagai berikut;
25. Reformasi Birokarasi Polri sudah memasuki gelombang keempat atau *grand strategi* periode terakhir 2020-2024 namun sampai saat ini Polda Kepri belum menerima ren aksi dari Mabes Polri untuk ditindak lanjuti pada masing masing satker;
26. Dari hasil penilaian dari kemenpan RB berdasarkan indikator penilaian satker Polda Kepri yang sudah mendapat predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dicapai oleh Polresta Barelang;
27. Sistem pelayanan publik harus lebih maksimal lagi dengan melengkapi kekeurangan-kekurangan sarana yang belum tersedia dan harus menyesuaikan dengan kondisi covid-19;
28. 7 prinsip Indeks Tata Kelola (ITK-O) : prinsip kompetensi, responsif, perilaku, transparan, keadilan. Efektifitas dan keadilan, sumber data pengukuran ITK besumber pada data primer dan sekunder;
29. Hasil nilai Indeks Tata Kelola Polda Kepri pada Tahun 2016 yang diwakili oleh Polres Karimun kategori wilayah perbatasan dan pulau terluar mendapatkan peringkat 2 dari seluruh Polres secara keseluruhan.
30. Paparan oleh Kabagstrajemen Rorena Polda Kepri tentang Renja dan Renstra Polda Kepri sebagai berikut;
31. Renja Polda Kepri Tahun 2021 sudah disusun dan disahkan dengan Keputusan Kapolda Kepri, untuk satker segera menyusun Renja Tahun 2021 dengan mempedomani Ran Renstra 2020-2024 satker dan Renja Polda Kepri Tahun 2021 yang sudah didistribusikan;
32. Untuk saat ini Renstra Polda Kepri 2020-2024 masih berproses/disusun dengan mempedomani Renstra Polri 2020-2024 dan dalam waktu dekat akan dirapatkan dengan melibatkan pengemban fungsi perencanaan;
33. Di dalam dokumen Renstra memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang berlaku selama 5 Tahun, untuk Renstra satker agar menyesuaikan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan tupoksi masing-masing;
34. Saat ini dokumen perencanaan baik perencanaan jangak pendek (Renja) dan perencanaan jangka menengah (Renstra) sudah selaras atau ada keterkaitan dengan program anggaran, dalam artian setiap kebijakan maupun kegiatan sudah terdukung oleh anggaran;
35. Agar setiap satker menyusun peta strategi dan indikator kinerja utama.
36. Anggaran

Kegiatan Musrenbang Polda Kepulauan Riau Tahun 2020 didukung anggaran Rorena Polda Kepulauan Riau yang teralokasi pada DIPA Rorena Polda Kepri Tahun Anggaran 2020.

1. **HASIL YANG DICAPAI**
2. pelaksanaan Musrenbang Polda Kepri Tahun 2020 berjalan dengan aman dan tertib;
3. para peserta Musrenbang mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh narasumber untuk dijadikan acuan dalam penyusunan produk perencanaan Renja Tahun 2021 dan Renstra Tahun 2020-2024;
4. setelah pelaksanaan Musrenbang Polda Kepri Tahun 2021 diharapkan Satker menyusun Renstra 2020-2024 dengan mempedomani Renstra Polda Kepri Tahun 2020-2024.
5. **PENUTUP**

Demikian Laporan pelaksanaan tugas Musrenbang Polda Kepri Tahun 2020 ini disampaikan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan bahan masukan kepada pimpinan dalam pengambilan kebijakan selanjutnya.

Batam, Juli 2020

KABAGSTRAJEMEN RORENA POLDA KEPRI

Selaku

KETUA

PAUZAN, SP

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74070787